

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran umum

Kota Komba merupakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati (Pejabat Penyelenggara) yaitu. Kepala Subbagian yang jabatannya di Wilayah Administratif Manggarai Timur. Badan ini melapor langsung kepada Sekretaris Daerah Daerah dan bertanggung jawab atas kegiatan Badan di daerah tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan mengatur dan melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kabupaten dan bertanggung jawab kepada masyarakat Manggarai Timur. Peran Dewan Daerah adalah mengarahkan roda pemerintahan satu tingkat di bawah Dewan Pemerintahan Manggara Timur agar dapat mengatur kekuasaan di berbagai daerah sesuai amanahnya dan mengarahkan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi daerah masyarakat, politik dan sosial budaya.

4.2. Sejarah Kota Komba

Kota Komba berdiri pada tahun 1969; Namun saat itu masih bernama Kecamatan Pembantu Mborong hingga tahun 1997. Pada tahun 1997, Kecamatan Kota Komba akhirnya berganti nama menjadi Kecamatan Kota Komba dengan Wae Lengga sebagai ibu kotanya. Kecamatan ini memiliki luas 491,95 km² dan mempunyai total 22 desa dan 19 kelurahan serta 3 kelurahan antara lain Desa Bamo, Desa Golo Meni, Desa Golo Ndele,

Desa Golo Nderu, Desa Golo Tolang dan Gunung. Kula, Desa Gunung Baru, Desa Komba, Desa Leburi, Desa Mbengi, Desa Mokel, Desa Mokel Moridi, Desa Paan Lelengin, Desa Watu Pari, Desa Pong Ruan, Desa Rana Kolong, Desa Rana Mbeling, Desa Rana Mbata, Desa Ruan, Rongga Desa Koe, Desa Tanah Rata, Desa Watu Nggene. Pada tahun 2021 ini Kecamatan Komba akan membagi kecamatan menjadi dua yaitu Kecamatan Komba menguasai 8 desa dan 3 kelurahan, serta bagian utara menguasai 11 desa. Terdapat 11 kelurahan yang sudah tidak termasuk dalam wilayahkelurahan Komba dan menjadi bagian dari Kota Komba Utara, yaitu Kelurahan Golo Meni, Kelurahan Golo Ndele, Kelurahan Golo Nderu, Kelurahan Golo Tolang, Kelurahan Gunung Baru, Kelurahan Mokel, Kelurahan Mokel Moridin Paan Desa Leleng , Desa Rana Mbelingi, Desa Rana Mbata, Desa WatuPari. Kecamatan Kota Komba, Letak, Luas dan Kondisinya Kota Kombamerupakan kecamatan paling timur dari Kecamatan Kota Komba di Wilayah Administratif Manggarai Timur. 327, 11 km².

Tabel 4.1.2 Luas wilayah Kecamatan Komba menurut desa/wilayah.

No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Watu Nggene	53,87
2	Bamo	40,27
3.	Komba	12,28
4.	Rongga Koe	11,43
5.	Rana Kolong	25,56
6.	Gunung	93,25
7.	Tanah Rata	38,81
8.	Ruan	11,55
9.	Pong Ruan	9,76
10.	Lembur	14,55
11.	Mbengan	15,78
12.	Jumlah	327,11

Sumber data: Kantor Kecamatan Kota Komba, 2023

Batas wilayah Kabupaten Komba adalah sebagai berikut:

- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Ngada
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Borongi
- Bagian Utara berbatasan dengan Kota Komba Utara
- Bagian Selatan. berbatasan dengan Telaga Asap

1. Lokasi

Kelurahan Komba merupakan kelurahan yang terletak di Wilayah Manggarai Timur bagian paling Timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Ngada yang mempunyai 11 Kelurahan yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 8 Desa.

2. Iklim Subbagian Perkotaan Komba beriklim tropis.

Topografinya umumnya berbukit, bergunung-gunungan agak datar. Kondisi hidrologi Kabupaten Kota Komba terdiri dari air tanah, air permukaan, curah hujan dan sumber air sungai.

3. Vegetasi dan Fauna

- Vegetasi: sebagian besar terdiri dari hutan dan semak belukar
- Fauna: sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, ayam, dll.

4.1.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga.

Menurut Laporan Kependudukan Reguler Tahun 2022, Kecamatan Kota Komba berpenduduk 35.767 jiwa, laki-laki 17.576 jiwa, perempuan 18.191 jiwa, dan jumlah 7.560 KK. Informasi sebaran penduduk di Kecamatan Komba disajikan pada tabel berikut.

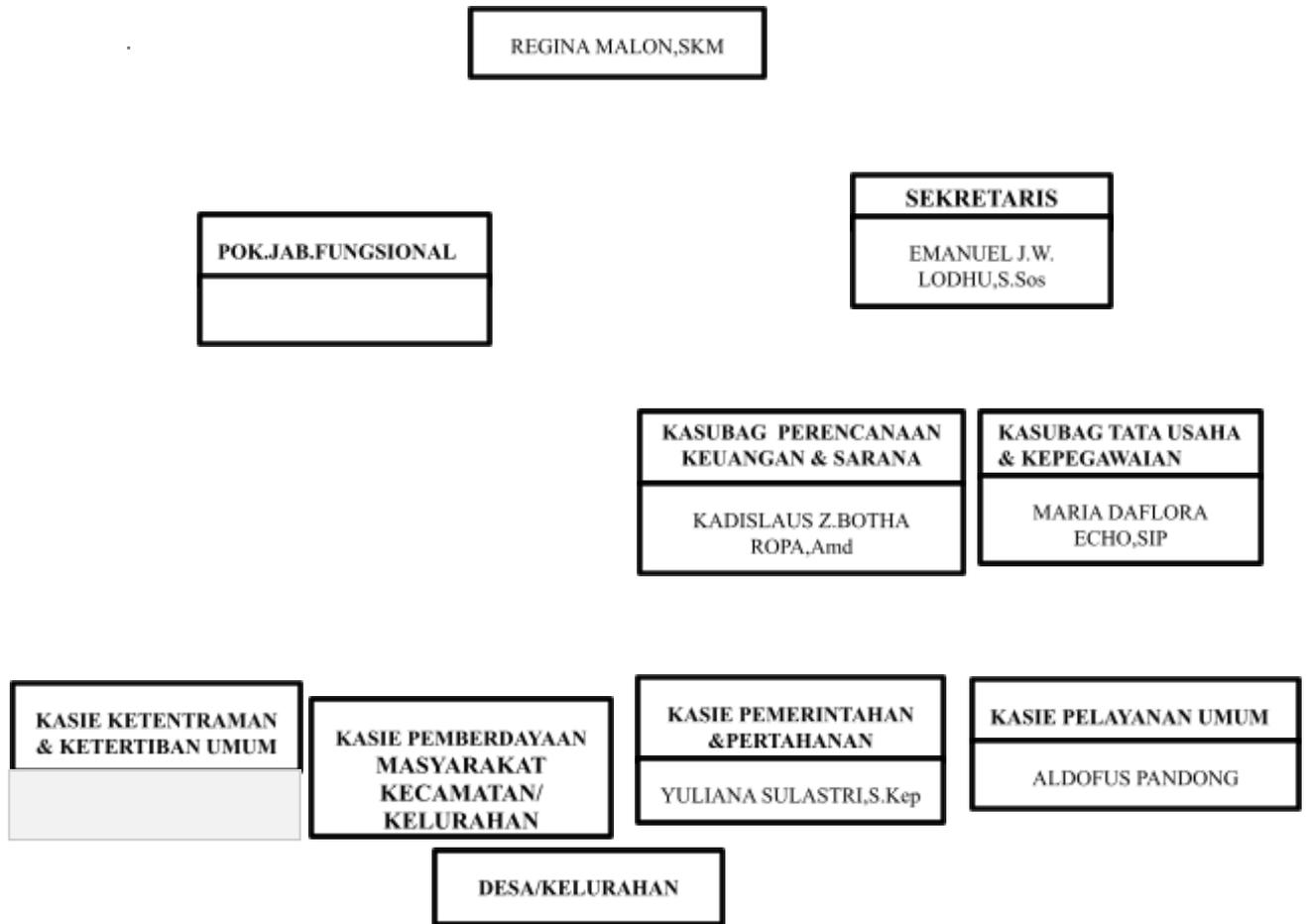
Tabel 4.1.3 Sebaran penduduk menurut jenis kelamin.

No	Desa/Kel	Jenis Kelamin			KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Watu Nggene	2359	2493	4852	980
2	Komba	1174	1196	2370	548
3	Bamo	1335	1298	2633	584
4	Rongga Koe	1550	1617	3167	773
5	Tanah Rata	3083	2673	5756	913
6	Lembur	1822	1960	3782	825
7	Rana Kolong	1235	1283	2518	657
8	Pong Ruan	1437	1564	3001	743
9	Ruan	1134	1186	2320	503
10	Gunung	1257	1462	2719	518
11	Mbengan	1325	1324	2649	516
Total		17711	18056	35767	7560

Sumber Data: Kantor Kecamatan Kota Komba, 2023

Berdasarkan informasi pada tabel terlihat jumlah anggota keluarga sebanyak 7.560 jiwa, hal ini mempengaruhi pertumbuhan baik jumlah penduduk yang lahir di luar daerah maupun jumlah pendatang.

Gambar 4.1.4 Struktur Organisasi Kabupaten Kota Komba.



Sumber:Kecamatan Kota Komba 2023

1. Tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi

Sub bagian dikelompokkan ke dalam organisasi daerah sesuai dengan jenis organisasinya. Hal ini terlihat jelas dalam Peraturan Daerah Manggraai Timur Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang rancangan struktur organisasi. Pemerintahan Daerah Manggraai Timur dan menetapkan kecamatan sebagai bagian daerah dari.

Pemerintahan Daerah Manggraai Timur. Struktur Berdasarkan peraturan

daerah tersebut, terdapat tiga unsur dalam organisasi subdaerah, yaitu: badan administratif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, unsur sub administrasi adalah sekretaris daerah, serta para pengurus dan kepala sub lembaga adalah bagian Unsur pelaksana atau unit organisasinya ada 5 departemen, yaitu Kementerian Keuangan, Departemen Keamanan dan Ketertiban, Departemen Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Sosial dan Budaya, dan Departemen Pemeliharaan Ruang Publik.

Berdasarkan rincian tugas, tugas dan tata kerja Daerah Administratif Bandung, berdasarkan Tugas Kecamatan dan Desa, Tugas dan Tata Kerja Daerah Administratif Bandung Tahun 2008, dapat diuraikan sebagai berikut: Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur/walikota dan gubernur kecamatan diangkat dari kalangan pejabat terpilih (PNS) atas usul gubernur/walikota.

1. Camat adalah pimpinan tertinggi kecamatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Kabupaten Manggarai Timur untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan kecamatan.

Bekerja sama seluruh bagian kantor. Tugas pokok dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menunjang kegiatan Pemerintahan di subdaerah yang dibantu oleh seluruh tingkatan/peralatan di Kantor Wilayah Kota Komba. Direktur distrik menerima laporan dan menetapkan serta menandatangani tujuan yang dicapai oleh dewan kecamatan.

2. Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab langsung kepada Sub-Administrator Daerah. Sekretaris Daerah adalah subbagian yang bertanggung jawab melaksanakan tugas administratif subbagian, mengoordinasikan kegiatan dengan masing departemen pada sub bagian dan melaksanakan tugas kesekretariatan di kantor untuk membantu gubernur kota kabupaten dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.

fungsi Sekretaris Daerah :

1. Direktur Departemen Administrasi dan Personalia, Kepala Departemen Perencanaan dan Manajemen Keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut: Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas administrasi, tugas daerah, dan penyelenggaraan keuangan dan saham.
3. Persiapan sebagian program distrik untuk tahun ini
4. Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan administrasi daerah, termasuk kepengurusan dan pengelolaan kepegawaian. Mengkoordinasikan aktivitas kepala departemen
5. Merencanakan perolehan dan pemeliharaan stok
6. Pengawasan terhadap evaluasi dan pelaksanaan urusan kota dan penyelenggaraan urusan kota; Melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh sekretaris daerah baik di dalam maupun di luar organisasi.

2. Kepala Departemen Keuangan dan Perencanaan Keuangan

Departemen dan Perencanaan Keuangan dipimpin oleh pejabat daerah yang mengelola urusan keuangan dan pelaporan serta perencanaan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat daerah. Wilayah tempat mereka bekerja. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana penggunaan anggaran keuangan dalam pengembangan subbagian dan peningkatan pelayanan administrasi. Dalam jabatannya, Direktur Perencanaan dan Sarana Keuangan menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas departemen perencanaan keuangan dan fasilitas.
2. Perencanaan keuangan setiap departemen dan penyusunan laporan pemerintah provinsi.
3. Menyediakan dan memelihara data dan informasi Pihak.
4. Melakukan evaluasi pelaporan.
5. Penyusunan laporan rutin pelaksanaan kegiatan perencanaan.
6. Sekretaris Daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas lain baik di dalam maupun di luar organisasi.
7. Akses Grup Stasiun.

8. Fungsi kelompok fungsional pos adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya beberapa tugas yang berkaitan dengan dewan daerah.
9. Satgas terdiri dari beberapa petugas yang diatur dan diangkat dengan undang-undang.
10. Gugus tugas tersebut akan dipimpin oleh seorang pejabat senior yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Jumlah pejabat tersebut di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
12. Jenis dan tingkat tugas operasional yang sesuai ditetapkan berdasarkan peraturan hukum.

3. Ketua Dewan Negara dan Departemen Administrasi Publik

1. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas nasional dan pelayanan publik.
 2. Penyusunan rencana aksi dan program pelaksanaan tugas administratif dan pelayanan publik kabupaten.
 3. Penyusunan buku petunjuk dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengembangan pengelolaan kependudukan, penghitungan kependudukan, dan pertanian.
 4. Melakukan evaluasi dan pemantauan.
 5. Penyusunan laporan berkala penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

6. Melaksanakan tugas resmi lainnya yang diberikan oleh manajer regional baik di dalam maupun di luar organisasi.

4. Manajer Departemen Pemberdayaan Masyarakat Distrik

Departemen Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Manajer Departemen yang bertanggung jawab kepada Manajer Subdistrik dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Subdistrik. Pemberdayaan Masyarakat Peran departemen adalah membantu Subdistrik Pengelola.

Dalam penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Perantara sendiri untuk memenuhi perannya, kepala departemen yaitu Departemen Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pengembangan dan Penerapan Masyarakat.
2. Penyusunan rencana aksi operasional dan program implementasi pemberdayaan masyarakat.
3. Implementasi Masyarakat Implementasi Monitoring dan Evaluasi Integritas Manajemen dalam bentuk Izin Usaha di Subbagian Kota Komba.
4. Pengumpulan dan penyimpanan informasi potensial pada sub-wilayah.

5. Penyusunan pedoman untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sub-komunitas.
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
7. Penyusunan laporan\berkala mengenai kinerja tugas departeme kekuatan komunitas.
8. Melaksanakan tugas resmi lainnya di dalam dan di luar organisasi yang ditugaskan oleh Manajer Regional.

5. Departemen Tenaga Kerja dan Penegakan Hukum

Dipimpin oleh seorang kepala departemen yang bertanggung jawab kepada camat dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris camat. Misi Departemen Kedamaian dan Ketertiban adalah membantu gubernur dalam menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perdamaian dan ketertiban umum. Kepala Departemen Perdamaian dan Ketertiban melaksanakan tugasnya:

1. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas departemen perdamaian dan ketertiban
2. Penyusunan rencana aksi dan program pelaksanaan pengembangan masyarakat dan ketertiban umum.
3. Rancangan pedoman penguatan pembangunan masyarakat, kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban umum di ilayah regional.

4. Melakukan evaluasi dan pemantauan.
5. Penyusunan laporan rutin pelaksanaan tugas departemen.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala departemen, baik di dalam maupun di luar organisasi.
7. Direktur Pelayanan Sosial divisi Pelayanan Sosial melapor kepada Direktur Distrik dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Distrik. Kementerian Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sumber daya untuk menyiapkan rencana aksi dan anggaran departemen sosial.
2. Penugasan tugas kepada bawahan.
3. untuk memimpin bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Memeriksa hasil kecil.
5. Persiapan sumber daya untuk mengubah tujuan kerja karyawan.
6. Persiapan tindakan perlindungan bagi penyedia layanan yang menderita masalah sosial.
7. Penyiapan sumber daya untuk mendorong penguatan kesejahteraan sosial.
8. Persiapan kegiatan pembelajaran.
9. Penyusunan Kegiatan Program Kesehatan Masyarakat.

4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini Organisasi Pelayanan Pemerintah Kota Komba. Dengan sumber daya manusia yang disiplin sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, jabatan dan keahliannya, tercapai efisiensi yang maksimal sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pegawai memerlukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional berdasarkan kepribadian dan etika sesuai kebutuhan untuk mencapai pelayanan yang maksimal. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Kecamatan Komba berjumlah 11 orang dan 2 orang. personel kontrak dan 1 Ban PP Pol.

Tabel 4.1.4. Nama pegawai subbagian kota Komba

NO	Nama Barang	Kuantitas
1	Peralatan Kantor	
	Printer	2
	Komputer	2
	Scanner	4
	Genset	1
	Proyektor	1
	Soundsystem	1
	Dispenser	1
	AC	1
2	Meubelair	
	-Meja Computer	3
	-Meja Pimpinan	1
	-Meja kerja	10
	-Kursi kayu	17
	Kursi Plastik	20
	Lemari Kayu	5
	Lemari Arsip	2
	Bangku Panjang	2
3	Jumlah	80

Sumber: Kantor Camat Kota Komba 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa kantor wilayah di Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana yaitu 13 peralatan kantor dan 58 perabot. Dari lokasi dan prasarana yang tersaji pada tabel, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan peralatan khususnya peralatan kantor, peralatan penunjang pelayanan administrasi sipil masih sangat kurang.